

Judul : Delapan lawan satu untuk persetujuan RUU PPP
Tanggal : Selasa, 08 Februari 2022
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

LEGISLASI

Delapan Lawan Satu untuk Persetujuan RUU PPP

JAKARTA, KOMPAS — Delapan dari sembilan fraksi di DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dijadikan inisiatif DPR. Satu fraksi yang menolak, Partai Keadilan Sejahtera, meminta substansi RUU didalami lagi.

Persetujuan untuk membawa draf RUU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) itu ke tingkat pengambilan keputusan di Rapat Paripurna DPR diambil dalam rapat pleno Panitia Kerja RUU PPP DPR yang dipimpin Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas, Senin (7/2/2022), di Jakarta.

Supratman mengatakan, setelah diambil keputusan di ting-

kat panja, RUU itu akan diusulkan untuk dibawa ke rapat paripurna terdekat guna ditetapkan sebagai RUU inisiatif DPR.

Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengatakan, rapat paripurna terdekat akan diadakan Selasa (8/2). Sejumlah hal akan dibahas, termasuk surat presiden mengenai nama-nama calon anggota KPU dan Bawaslu serta permintaan persetujuan RUU PPP jadi inisiatif DPR.

Pembahasan RUU PPP merupakan bagian dari respons pembentuk UU untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menilai UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Salah satu yang disoroti MK ialah metode penyusunan UU Cipta Kerja dengan regulasi *omnibus law* tak diatur dalam mekanisme pem-

bentukan UU di Tanah Air. Kedua, MK menyoroti belum optimalnya partisipasi masyarakat yang bermakna dalam pembahasan UU Cipta Kerja.

Dua fraksi

Dalam memberi pendapat, dua fraksi, fraksi-fraksi sepakat tidak membacakannya, tetapi menyerahkan dokumennya kepada pimpinan rapat. Hanya dua fraksi yang membacakan poin catatan secara singkat, yakni Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan PKS.

Anggota Baleg DPR dari Fraksi PKB, Luluk Nur Hamidah, mengatakan, fraksinya pada intinya menyetujui draf RUU PPP dibawa ke tahap selanjutnya. Namun, PKB menekankan sejumlah hal untuk diperhatikan, utamanya yang terkait

partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. "Bagi PKB, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna agar memenuhi tiga prasyarat, yakni hak untuk didengarkan pendapatnya, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan," katanya.

Anggota Baleg DPR dari Fraksi PKS, Mulyanto, mengatakan, fraksinya menolak pengambilan keputusan rapat pleno Panja RUU PPP yang dilakukan kemarin karena fraksinya menilai substansi RUU PPP masih perlu didalami. PKS, antara lain, meminta agar ada prasyarat tertentu penggunaan metode *omnibus law* yang diatur dalam RUU PPP itu, (BEK)